

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Satuan Kerja pada Pemerintah Pusat/Daerah sebagai entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan yang baik pada Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Ilahi, 2014). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual merupakan proses yang berkelanjutan atau dapat dikatakan berkesinambungan dan terpadu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual (*cash toward accrual*), dimana basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual (*accrual basis*), dimana basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas di terima atau di bayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam metode basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima. Sedangkan beban diakui pada saat

kas dibayarkan. Artinya, entitas pengelola keuangan negara mencatat beban di dalam transaksi jurnal entry ketika kas di keluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima (Warta BPK, 2015).

Berbeda dengan basis akrual, *accrual basis* pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, Karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan (Warta BPK, 2015). Jika dilihat dari segi kelebihan dan kelemahannya maka kelemahan dari basis kas (*cash basis*) yaitu tidak dapat diukur dengan tingkat efektivitas dan efisiensi pada suatu program, kegiatan atau kebijakan dengan baik. Sedangkan kelebihan dari basis akrual (*accrual basis*) yaitu dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, komprehensif, lebih relevan dan akurat dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dengan basis kas. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih jelas atas kondisi keuangan organisasi dari pada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks dari pada basis kas. Basis akrual juga mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian (Warta BPK, 2015)

Adanya perubahan yang terjadi pada sektor pemerintahan tersebut, maka terbentuklah perubahan pada akuntansi di sektor pemerintah, yaitu perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan oleh pemerintah karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi dapat memberikan hasil laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang dihasilkan tidak memuaskan, terutama karena kelemahannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang tepat/akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memenuhi perencanaan dan proses (PP 71 Tahun 2010 Lampiran 1).

Keberhasilan perubahan basis akuntansi pemerintahan dari *cash toward accrual basis* menjadi *accrual basis* untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari seluruh elemen pemerintah, akademisi, dan seluruh stake holder. Banyak kendala yang masih dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual (basis yang sebelumnya diterapkan). Hal ini ditunjukkan dengan belum ditetapkannya Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dukungan anggaran yang kurang, yaitu kurangnya anggaran untuk kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan teknologi informasi. Teknologi informasi yang belum optimal, seperti sistem informasi yang belum terintegrasi seluruh SKPD, serta belum adanya pengamanan dan back up data untuk memitigasi risiko jika terjadi gangguan sistem dan Kurangnya SDM yang memahami akuntansi dan sistem informasi, yang belum ditindaklanjuti dengan pengadaan pegawai yang kompeten dan pelatihan SDM untuk menambah kompetensinya (Adiprojo, 2015). Saat penerapan akuntansi basis akrual, pemerintah perlu melakukan persiapan mulai dari penyusunan kebijakan akuntansi dan pelatihan pegawai untuk implementasi (Eman, Akuntan BPKAD Pemprov Sumsel 2017). Menurut wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki (2017), seluruh kepala daerah, harus lebih hati-hati dan professional dalam penyiapan laporan keuangan, dimana laporan keuangan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel (KoranKito.com Maret, 2017). Ishak Mekki (2016), sebagian besar daerah di Sumatera Selatan sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait laporan keuangan daerah, ini harus ditingkatkan sehingga seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan opini WTP (Sumatera news, 2016).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia, berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, yaitu SDM, Motivasi, Budaya Organisasi (Ajeng

Witantri, 2012), SDM, Komunikasi dan Pengendalian Internal (Gusti, Desi dan Nyoman, 2017), Tingkat Pendidikan Staff Keuangan, Teknologi Informasi dan Dukungan Konsultan (Indra, 2013), Komitmen, SDM dan Alat Dukungan (Endang, 2015), SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lutfi, 2015).

Hal ini sesuai dengan penelitian Simanjuntak dan Amriani (2010) yang menyatakan bahwa pada saat ini, semakin kuatnya upaya kebutuhan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut sangat terasa. Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah secara serius perlu menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk juga dalam memberikan remunerasi dan sistem insentif yang memadai untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.

Komunikasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Penyebab salah satu kelemahan dari penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komunikasi yang disampaikan kepala/pimpinan satuan kerja, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kejelasan perundang-undangan yang mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pihak pemangku seperti pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah (Amriani, 2010).

Teknologi Informasi juga merupakan faktor yang penting terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Menurut penelitian dari Amriani (2010) timbulnya kompleksitas dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system*. Dalam tujuan untuk mendukung penerapan basis akrual, penggunaan teknologi yang andal sangat diperlukan, guna mendukung keberhasilan dalam pengolahan data baik pada masa penerapan basis akrual secara penuh maupun pada masa transisi.

Dari penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah

strategi implementasi yang direncanakan dengan baik, tujuan yang dikomunikasikan secara jelas, sumber daya manusia yang andal, dan kualitas teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara sumber daya manusia, komunikasi dan teknologi informasi secara parsial signifikan dan positif terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI.
2. Apakah terdapat pengaruh antara sumber daya manusia, komunikasi dan teknologi informasi secara simultan signifikan dan positif terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan dari penelitian yang dilakukan dan agar dalam melakukan penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah SDM, Komunikasi, Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada 35 SKPD di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai peran penting dalam mengurus laporan keuangan. Serta dalam mengelola datanya menggunakan SPSS Versi 24 *for windows* tahun 2016.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut untuk mengetahui :

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Teknologi Informasi secara parsial positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua.
2. Pengaruh SDM, Komunikasi, dan Teknologi Informasi secara simultan positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai pemangku kepentingan untuk memperdalam pengetahuan peneliti dan mendapatkan hasil dari pengaruh Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Pemerintah provinsi juga apabila ingin melakukan pembenahan terhadap Sumber Daya Manusia, Komunikasi, dan Teknologi Informasi yang ada dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
3. Bagi pihak lain, penelitian yang telah dilakukan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang sejenis khususnya yaitu, yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Teknologi Informasi yang berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.